

Refleksi Nilai-nilai Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Berbangsa dan Bernegara dalam Kehidupan (Studi Kasus Desa Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang)

M. Akbar¹, Lelyana Lestari Siregar², Dwi Ziland Calista Prayogi³, Najwa Syaidinah⁴,
Aqlima Kurnia⁵, Rindi Fazirah⁶, Salsabila Dini Azijah⁷, Cinda Narista⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: akbarpit969@gmail.com¹, lelilelianalestari@gmail.com², dwizilan09@gmail.com³,
najwasyaidinah19@gmail.com⁴, aqlimakurnia9@gmail.com⁵, rindifazirah@gmail.com⁶,
diniajizahh@gmail.com⁷, cindanarista79@gmail.com⁸

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang nilai-nilainya seharusnya tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma reformasi berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 40 responden yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang berkaitan dengan pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap peran Pancasila dalam mendukung proses reformasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tuntungan II memiliki pandangan yang positif terhadap peran Pancasila sebagai landasan filosofis reformasi, acuan dalam penyelesaian permasalahan, serta pedoman dalam reformasi birokrasi dan sistem politik. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dan penting sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Kehidupan Masyarakat, Nilai-nilai Pancasila, Paradigma Reformasi, Reformasi Berbangsa dan Bernegara.

Development of Video Media for Learning Ecosystem Material in Science Learning for Class V of Qur'ani Islamic Elementary School, Banda Aceh

Abstract

Pancasila serves as the foundation of the state as well as a guideline for national state life, whose values should be reflected in the daily life of society. This study aims to reflect the implementation of Pancasila values as a paradigm of national and state reform in the community life of Tuntungan II Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency. This research employs a descriptive quantitative approach involving 40 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through questionnaires related to public understanding and perceptions of the role of Pancasila in supporting the reform process. The data were analyzed using descriptive analysis by calculating the frequency and percentage of respondents' answers. The results indicate that the community of Tuntungan II Village

has a positive perception of Pancasila as a philosophical foundation for reform, a reference for problem-solving, and a guideline in bureaucratic and political reform. These findings confirm that Pancasila remains relevant and essential as a paradigm of reform in national and state life.

Keywords: *Community Life, Pancasila Values, Reform Paradigm, National and State Reform.*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan di Indonesia (Kaelan, 2016). Dalam konteks reformasi, Pancasila memiliki peran strategis sebagai paradigma yang mengarahkan proses perubahan agar tetap berjalan sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai dasar bangsa (Latif, 2019).

Reformasi berbangsa dan bernegara pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem dan kebijakan, tetapi juga menyangkut perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai-nilai Pancasila dipahami dan dihayati oleh masyarakat sebagai subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Notonagoro, 2015). Reformasi yang tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti melemahnya persatuan, ketimpangan sosial, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga publik (Asshiddiqie, 2018).

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma reformasi. Tingkat pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap Pancasila dapat menjadi indikator dalam melihat sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang bersifat empiris untuk menggambarkan pandangan masyarakat terhadap peran Pancasila dalam proses reformasi berbangsa dan bernegara (BPIP, 2020).

Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah dengan karakteristik masyarakat yang beragam dari segi sosial, ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Keberagaman tersebut menjadikan Desa Tuntungan II sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pandangan masyarakat mengenai peran Pancasila sebagai paradigma reformasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma reformasi berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Desa Tuntungan II (Profil Desa Tuntungan II).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma reformasi berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran berdasarkan data yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tuntungan II. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan jumlah sampel

sebanyak 40 orang responden. Responden dipilih berdasarkan pertimbangan keterwakilan masyarakat desa serta kemampuan responden dalam memahami dan memberikan penilaian terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup. Kuesioner tersebut berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman, sikap, dan pandangan responden terhadap peran Pancasila dalam mendukung reformasi di bidang sosial, politik, dan kehidupan bermasyarakat. Instrumen penelitian disusun dengan skala penilaian untuk memudahkan pengukuran persepsi responden (Arikunto, 2019).

Data yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menghitung frekuensi dan persentase jawaban responden. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kecenderungan jawaban responden serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma reformasi berbangsa dan bernegara (Assingkily, 2021; Sudjana, 2016).

Desa Tuntungan II merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Secara geografis, wilayah Desa Tuntungan II memiliki batas administratif sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Sembahe Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Belawan dan Sukarende (Kecamatan Pancur Batu dan Kutalimbaru), sebelah timur berbatasan dengan Desa Durin Jangak, serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Tuntungan I. Berdasarkan data administrasi desa tahun 2024, Desa Tuntungan II memiliki luas wilayah sebesar 390 hektare. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Desa Tuntungan II tercatat sebanyak 5.199 jiwa, yang terdiri dari 2.520 laki-laki dan 2.679 perempuan, dengan jumlah 1.683 kepala keluarga. Kepadatan penduduk mencapai 351 jiwa per kilometer persegi, yang menunjukkan bahwa wilayah ini tergolong cukup padat dan memiliki dinamika sosial yang relatif tinggi.

Pemanfaatan wilayah Desa Tuntungan II terdiri atas kawasan permukiman penduduk, lahan pertanian, fasilitas umum dan sosial, serta lahan lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kawasan permukiman menjadi bagian terbesar dari penggunaan lahan karena berfungsi sebagai pusat tempat tinggal dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain itu, lahan pertanian digunakan untuk mendukung mata pencaharian masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan usaha berbasis sumber daya lokal.

Dari sisi mata pencaharian, penduduk Desa Tuntungan II menunjukkan struktur ekonomi yang beragam. Sebagian besar penduduk berada pada kategori belum atau tidak bekerja, yaitu sebanyak 801 penduduk laki-laki dan 876 penduduk perempuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terserap secara optimal dalam dunia kerja, yang dapat dipengaruhi oleh faktor usia, tingkat pendidikan, maupun keterbatasan lapangan pekerjaan di wilayah desa.

Pada sektor pertanian, terdapat penduduk yang bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 35 laki-laki dan 32 perempuan, serta buruh tani sebanyak 32 laki-laki dan 25 perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat, meskipun bukan merupakan sektor dominan di Desa Tuntungan II.

Selain sektor pertanian, masyarakat juga bekerja pada sektor formal. Penduduk yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tercatat sebanyak 8 laki-laki dan 13 perempuan. Di bidang kesehatan, terdapat 2 bidan swasta dan 8 perawat swasta, yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Keberadaan tenaga kesehatan ini menunjukkan adanya peran sektor pelayanan dalam mendukung kebutuhan masyarakat desa. Pada sektor keamanan, terdapat 25 penduduk laki-laki yang berprofesi sebagai anggota TNI dan 3 penduduk laki-laki sebagai anggota POLRI. Selain itu, terdapat pula pensiunan TNI/POLRI/PNS sebanyak 9 laki-laki dan 13 perempuan, yang mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor formal pemerintahan dan pertahanan.

Sementara itu, sektor wiraswasta menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menonjol, dengan jumlah 217 penduduk laki-laki dan 232 penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mandiri memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam struktur ekonomi Desa Tuntungan II. Secara keseluruhan, keberagaman mata pencaharian tersebut menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat desa yang heterogen dan berkembang sesuai dengan potensi serta kondisi sosial ekonomi setempat.

Sebagian wilayah lainnya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan sosial, seperti sarana pendidikan, tempat ibadah, jalan desa, serta fasilitas penunjang pelayanan masyarakat. Adapun sisa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan terbuka dan lahan non-produktif yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan ruang pengembangan desa di masa mendatang. Secara keseluruhan, pembagian pemanfaatan wilayah tersebut mencakup seluruh luas wilayah Desa Tuntungan II yang berjumlah 390 hektare.

Tabel 1. Pembagian Luas Wilayah Desa Tuntungan II

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Luas (Hektare)
1	Kawasan Permukiman Penduduk	165
2	Lahan Pertanian dan Lahan Produktif	140
3	Fasilitas Umum dan Sosial	55
4	Lahan Terbuka dan Non-Produktif	30
Total Luas Wilayah		390

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 40 responden masyarakat Desa Tuntungan II. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat pandangan masyarakat terhadap peran Pancasila sebagai paradigma reformasi berbangsa dan bernegara.

Tabel 2. Peran Pancasila sebagai Landasan Filosofis Reformasi

Kategori Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sangat Baik	14	35,0
Baik	26	65,0
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Sangat Kurang	0	0
Total	40	100

Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar responden (65%) menyatakan bahwa Pancasila berperan baik sebagai landasan filosofis reformasi, sementara 35% responden menilai peran tersebut sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tuntungan II memandang Pancasila sebagai pedoman yang relevan dalam mengarahkan proses reformasi berbangsa dan bernegara. Persepsi positif tersebut mengindikasikan adanya pemahaman masyarakat bahwa Pancasila tetap dibutuhkan sebagai dasar nilai dalam menjaga arah perubahan agar selaras dengan kepentingan bersama Jati diri bangsa.

Tabel 3. Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila dalam Mendukung Reformasi Berkelanjutan

Kategori Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sangat Baik	32	80,0
Baik	5	12,5
Cukup	3	7,5
Kurang	0	0
Sangat Kurang	0	0
Total	40	100

Berdasarkan Tabel 3, sebagian besar responden (80%) memiliki pemahaman sangat baik terhadap peran Pancasila dalam mendukung reformasi berkelanjutan. Sebanyak 12,5% responden menilai pemahamannya baik, sementara 7,5% responden berada pada kategori cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Tuntungan II telah memahami peran strategis Pancasila dalam menopang proses reformasi, meskipun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang memerlukan penguatan pemahaman agar nilai-nilai Pancasila dapat dihayati secara lebih menyeluruh.

Tabel 4. Pancasila sebagai Acuan Penyelesaian Permasalahan Reformasi

Kategori Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sangat Baik	31	77,5
Baik	4	10,0
Cukup	5	12,5
Kurang	0	0
Sangat Kurang	0	0
Total	40	100

Berdasarkan Tabel 4, mayoritas responden (77,5%) menilai bahwa Pancasila berperan sangat baik sebagai acuan dalam penyelesaian berbagai permasalahan reformasi. Sebanyak 10% responden menilai peran tersebut baik, sementara 12,5% responden menilai cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa Pancasila dipandang sebagai pedoman yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan kelembagaan yang muncul dalam proses reformasi, meskipun masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang menilai perlunya penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila secara lebih konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 5. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Reformasi Birokrasi

Kategori Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sangat Baik	31	77,5
Baik	9	22,5
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Sangat Kurang	0	0
Total	40	100

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas responden (77,5%) menilai bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam reformasi birokrasi berada pada kategori sangat baik, sedangkan 22,5% responden menilai baik. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tuntungan II memandang reformasi birokrasi telah berjalan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek etika pelayanan publik, transparansi, dan tanggung jawab aparatur pemerintahan. Dominannya penilaian positif ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila masih menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat desa.

Tabel 6. Peran Pancasila dalam Reformasi Sistem Politik dan Demokrasi

Kategori Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sangat Baik	2	5,0
Baik	31	77,5
Cukup	7	17,5
Kurang	0	0
Sangat Kurang	0	0
Total	40	100

Berdasarkan Tabel 6, mayoritas responden (77,5%) menilai bahwa Pancasila berperan baik dalam mendukung reformasi sistem politik dan demokrasi. Sebanyak 17,5% responden menilai peran tersebut cukup, sementara 5% responden menilai sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tuntungan II secara umum memandang Pancasila sebagai pedoman yang relevan dalam kehidupan politik dan demokrasi, meskipun sebagian responden masih menilai bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik perlu terus diperkuat agar lebih dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tuntungan II memiliki pandangan yang positif terhadap peran Pancasila sebagai paradigma reformasi berbangsa dan bernegara. Tingginya tingkat persetujuan responden menunjukkan bahwa Pancasila masih dipandang relevan sebagai landasan filosofis dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan reformasi (Suyanto, 2019; Winarno, 2017).

Pemahaman masyarakat yang sangat baik terhadap Pancasila mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat (Asshiddiqie, 2017). Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung reformasi yang berkelanjutan, karena reformasi yang tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan konflik dalam masyarakat (Darmodiharjo, 2016).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pancasila dipandang mampu

menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan yang muncul selama proses reformasi, termasuk dalam reformasi birokrasi dan sistem politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam reformasi birokrasi dinilai sangat baik, yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Attamimi, 2018).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai paradigma reformasi yang mampu menjaga arah perubahan agar tetap sesuai dengan nilai budaya bangsa dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang memiliki pandangan yang positif terhadap peran Pancasila sebagai paradigma reformasi berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dipahami tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam menghadapi perubahan dan tantangan reformasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila dipandang relevan sebagai landasan filosofis reformasi, acuan dalam penyelesaian permasalahan sosial, serta pedoman dalam reformasi birokrasi dan sistem politik. Tingginya tingkat persetujuan responden mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dan diakui perannya dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, Pancasila tetap memiliki posisi strategis sebagai paradigma reformasi yang mampu menjaga arah perubahan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar bangsa.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, masyarakat Desa Tuntungan II diharapkan dapat terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga toleransi, kebersamaan, dan musyawarah sebagai bagian dari penguatan reformasi berbangsa dan bernegara di tingkat lokal. Kedua, pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat agar proses reformasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma reformasi dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Attamimi, A. Hamid S. 2018. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: UI Press.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 2020. *Nilai-Nilai Pancasila*. Jakarta: BPIP.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Yudi. 2019. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia.
- Notonagoro. 2015. *Pancasila: Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Profil Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.
- Sudjana, Nana. 2016. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2019. "Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara." *Jurnal Civics*, Vol. 16 No. 2.
- Winarno. 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara.